



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 108 PURWOKERTO Kode Pos 53116
Telp/Fax (0281) 636149, Email : dinkannak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 050/22/I/2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Penataan Ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Organisasi Instansi Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Ukuran, dan Tepat Proses;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Banyumas;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas adalah :
- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. Mempermudah komunikasi secara internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026; dan

c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai Proses Bisnis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

KETIGA : Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Sebagai alat untuk mempermudah melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 6 Januari 2025



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
Nomor : 050/22/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung / Manajerial	BMS. NAKKAN.01
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.02
3	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.03
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.04
5	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.05
6	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.06
7	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.07
8	Perizinan Usaha Pertanian	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.08
9	Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perikanan	Utama/Inti	BMS. NAKKAN.09



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
 Nomor : 050/22/I/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

Identifikasi Sub Proses – Lintas Fungsi – SOP AP

NO	SUB PROSES (KEGIATAN)	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)	KODE LINTAS FUNGSI
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.01		
	Optimalnya produksi perikanan budidaya			
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	BMS.NAKKAN.02		
1	Pengelolaan Perikanan Budidaya	BMS.NAKKAN.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	BMS.NAKKAN.02.01.01 BMS.NAKKAN.02.01.02 BMS.NAKKAN.02.01.03 BMS.NAKKAN.02.01.04 BMS.NAKKAN.02.01.05 BMS.NAKKAN.02.01.06
2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	BMS.NAKKAN.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	BMS.NAKKAN.02.02.01 BMS.NAKKAN.02.02.02 BMS.NAKKAN.02.02.03 BMS.NAKKAN.02.02.04
3	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.02.03	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.02.03.01
	Optimalnya produksi perikanan tangkap			
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	BMS.NAKKAN.03		
4	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	BMS.NAKKAN.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	BMS.NAKKAN.03.01.01

NO	SUB PROSES (KEGIATAN)	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)	KODE LINTAS FUNGSI
5	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.03.02	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	BMS.NAKKAN.03.02.01
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	BMS.NAKKAN.03.02.02
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	BMS.NAKKAN.04		
6	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.04.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.04.01.01
	Optimalnya Produksi Peternakan			
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	BMS.NAKKAN.05		
7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.05.01	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	BMS.NAKKAN.05.01.01
8	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.05.02	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	BMS.NAKKAN.05.02.01
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	BMS.NAKKAN.05.02.02
9	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	BMS.NAKKAN.05.03	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	BMS.NAKKAN.05.03.01
10	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.05.04	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	BMS.NAKKAN.05.04.01
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	BMS.NAKKAN.05.04.02
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	BMS.NAKKAN.05.04.03
11	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	BMS.NAKKAN.05.05	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	BMS.NAKKAN.05.05.01
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BMS.NAKKAN.06		
12	Pembangunan Prasarana Pertanian	BMS.NAKKAN.06.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	BMS.NAKKAN.06.01.01
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	BMS.NAKKAN.06.01.02
13	Pengelolaan Wilayah Sumber Benih/Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.06.02	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Benih/Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	BMS.NAKKAN.06.02.01
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	BMS.NAKKAN.07		
20	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.07.01	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	BMS.NAKKAN.07.01.01
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.07.01.02
21	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.07.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	BMS.NAKKAN.07.02.01
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	BMS.NAKKAN.07.02.02

NO	SUB PROSES (KEGIATAN)	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)	KODE LINTAS FUNGSI
22	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	BMS.NAKKAN.07.03	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	BMS.NAKKAN.07.03.01
			Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	BMS.NAKKAN.07.03.02
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	BMS.NAKKAN.07.03.03
			Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	BMS.NAKKAN.07.03.04
23	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	BMS.NAKKAN.07.04	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	BMS.NAKKAN.07.04.01
	Perizinan Usaha Pertanian	BMS.NAKKAN.08		
25	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	BMS.NAKKAN.08.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	BMS.NAKKAN.08.01.01
	Optimalisasi Olahan Hasil Perikanan			
	Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perikanan	BMS.NAKKAN.09		
4	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	BMS.NAKKAN.09.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.09.01.01
5	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	BMS.NAKKAN.09.02	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	BMS.NAKKAN.09.02.01
6	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	BMS.NAKKAN.09.03	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.09.03.01
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BMS.NAKKAN.09.03.02



Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
 Nomor : 050/22/I/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

Identifikasi Lintas Fungsi

KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran	Optimalnya produksi perikanan budidaya			
BMS.NAKKAN.02	Pengelolaan Perikanan Budidaya			
BMS.NAKKAN.02.01	Pengelolaan Perikanan Budidaya			
BMS.NAKKAN.02.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Perikanan, BPS, BPPSDM, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.01.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Perikanan, DPRD, Pokdakan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.01.03	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bidang Pengembangan Perikanan, Dinakerkop UKM, BPPSDM, Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.01.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Perikanan, Perguruan Tinggi, Pembudidaya Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Satu Daerah Kabupaten yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.01.05	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Bidang Pengembangan Perikanan, DPU,Dinpertan KP, Bappedalitbang, Pembudidaya Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.01.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Bidang Pengembangan Perikanan, Dinpertan KP, Bappedalitbang, Pembudidaya Ikan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			
BMS.NAKKAN.02.02.01	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Bidang Perikanan Budidaya/Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan, Dinakerkop UKM, Dinperindag, Perbankan, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.02.02	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Perikanan Budidaya/Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan, BPPSDM, Perguruan Tinggi, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Perikanan Budidaya

KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
BMS.NAKKAN.02.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Bidang Perikanan Budidaya/Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan, Dinakerkop UKM, BPPSDM, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.02.04	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Bidang Perikanan Budidaya/Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Ikan, Perguruan Tinggi, DKP Provinsi, BPPSDM, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Bidang Perikanan Budidaya
BMS.NAKKAN.02.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.02.03.01	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Perikanan, DPPMPTSP, BPPSDM, Pokdakan, Pembudidaya Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Bidang Perikanan Budidaya
Sasaran	Optimalnya produksi perikanan tangkap			
BMS.NAKKAN.03	Pengelolaan Perikanan Tangkap			
BMS.NAKKAN.03.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
BMS.NAKKAN.03.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DPU, BPS, BPPSDM, Nelayan, KUB, Pokmaswas	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten Kota yang Tersedia	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.03.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.03.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	BPPSDM, Nelayan, KUB, Pokmaswas	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.03.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinakerkop UKM, BPPSDM, Nelayan, KUB, Pokmaswas	Jumlah kelompok nelayan kecil yang di fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.04	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
BMS.NAKKAN.04.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.04.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DPU, DLH, BPPSDM, Nelayan, KUB, Pokmaswas	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten Kota	Bidang Pengembangan Perikanan

KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
Sasaran	Optimalnya Produksi Peternakan			
BMS.NAKKAN.05	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
BMS.NAKKAN.05.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.05.01.01	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Perbibitan Ternak dan HPT, BPTU-SP, Dipertan KP, Perguruan Tinggi, KTT, Peternak	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.02	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.05.02.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih Bibit Ternak Bahan Pakan Pakan Tanaman Skala Kecil	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.02.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Bidang Keswan dan Kesmavet, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.03	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			
BMS.NAKKAN.05.03.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.05.04.01	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Benih Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.04.02	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Benih Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.04.03	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Pengawasan Produksi Benih Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan Pakan	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.05.05	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			

KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
BMS.NAKKAN.05.05.01	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Dinpertan KP, DPRD, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.06	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
BMS.NAKKAN.06.01	Pembangunan Prasarana Pertanian			
BMS.NAKKAN.06.01.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT RPH, DPU, Masyarakat	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.06.01.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, UPT Perbibitan Ternak dan HPT, DPU, DPRD, KTT, Peternak, Masyarakat	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.06.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
BMS.NAKKAN.06.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Bidang Keswan dan Kesmavet, UPT Puskeswan, Bappedalitbang, Dinpertan KP, Dinakerkop UKM, Dinperindag, BPTU-SP, Dinakkeswan Prov, KTT, Peternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.07	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
BMS.NAKKAN.07.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.07.01.01	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, BPBD, Dinakkeswan Prov, KTT, Peternak	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.01.02	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, Dinkes, Dinakkeswan Prov, KTT, Peternak	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.02	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
BMS.NAKKAN.07.02.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	UPT Puskeswan, Koperasi Pesat, KTT, Peternak	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.02.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, Dinakkeswan Prov, Koperasi Pesat, KTT, Peternak	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.03	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			

KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
BMS.NAKKAN.07.03.01	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, Dinakkeswan Prov, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.03.02	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, Dinakkeswan Prov, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, BBVet, Dinakkeswan Prov, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.03.04	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, Dinakkeswan Prov, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah rekomendasi pemasukan dan pengeluaran sertifikat veteriner dan SKKH SKPH hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya HPM	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.07.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			
BMS.NAKKAN.07.04.01	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Bidang Peternakan, UPT Puskeswan, UPT RPH, Dinakkeswan Prov, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet
BMS.NAKKAN.08	Perizinan Usaha Pertanian			
BMS.NAKKAN.08.01	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			
BMS.NAKKAN.08.01.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Bidang Keswan dan Kesmavet, DPMPTSP, Pelaku Usaha Peternakan, KTT, Peternak	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Bidang Peternakan
BMS.NAKKAN.09	Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perikanan			
BMS.NAKKAN.09.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
BMS.NAKKAN.09.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya, DPMPTSP, Diperindag, Dinakerkop UKM, DPMPTSP, BPS, BPPSDM, UPI, Poklahsar	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.09.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			

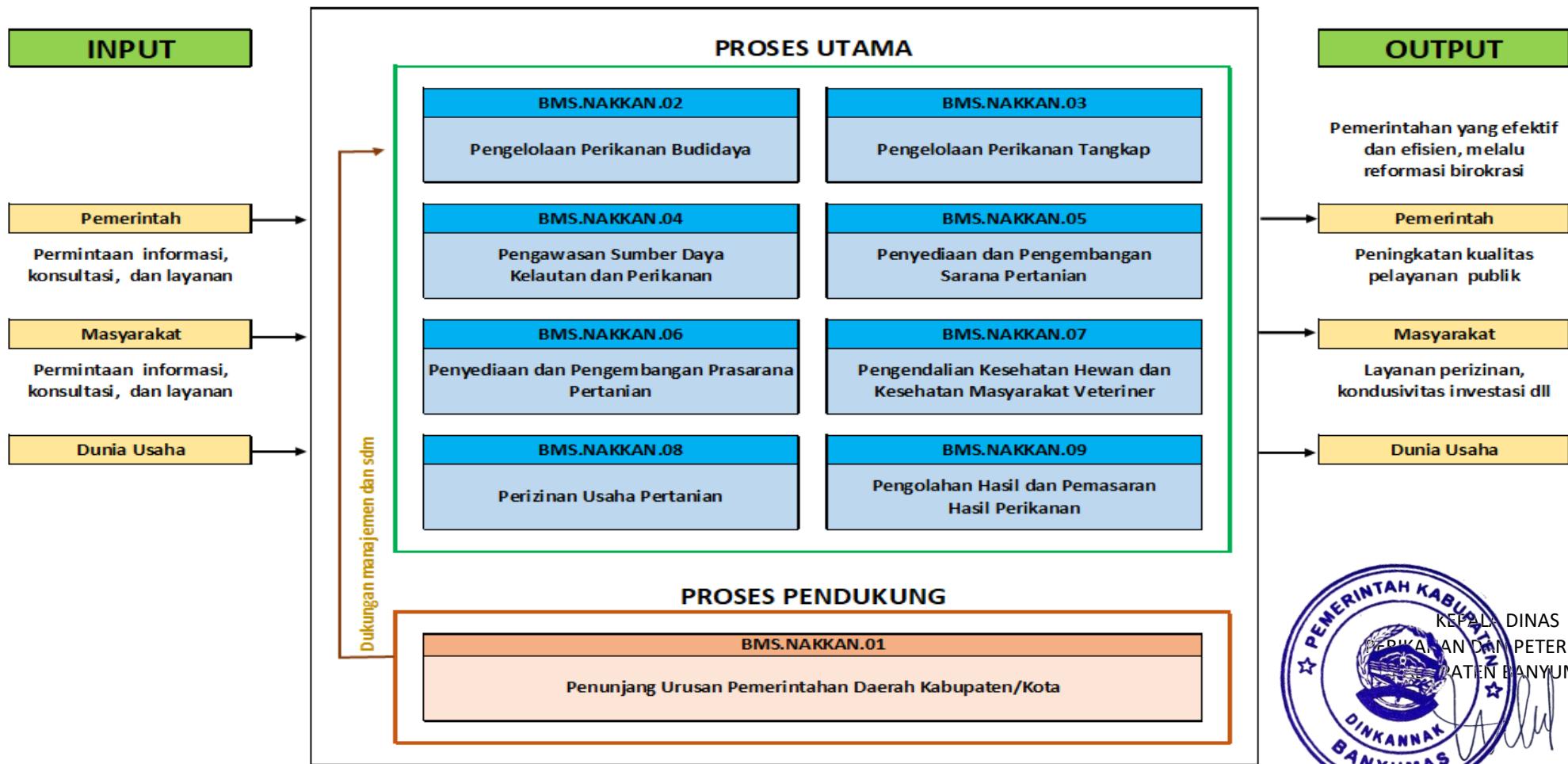
KODE	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT (INDIKATOR SUB KEGIATAN)	PENANGGUNG JAWAB
BMS.NAKKAN.09.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bidang Perikanan Budidaya, DPMPTSP, Dinperindag, Dinakerkop UKM, DKP Prov, BPPSDM, Perguruan Tinggi, UPI, Poklahsar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.09.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
BMS.NAKKAN.09.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya, BPPSDM, Pokdakan, Pembudidaya, UPI, Poklahsar	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Perikanan
BMS.NAKKAN.09.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya, BPPSDM, DPRD, Perbankan, UPI, Poklahsar	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota yang Terfasilitasi	Bidang Pengembangan Perikanan

KEPALA DINAS
 PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
Nomor : 050/22/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PETA PROSES BISNIS DINKANNAK KAB. BANYUMAS



Lampiran 5 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas
Nomor : 050/22/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PETA PROSES BISNIS DINKANNAK KAB. BANYUMAS

